



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
(22865)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan di daerah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi, tingkat keberhasilan program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan selama Tahun Anggaran 2025.

LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 memuat gambaran mengenai capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Nias Selatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat di sektor perikanan.

Teluk Dalam, 13 Maret 2026

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Nias Selatan

RAJIN HARIA, S.H., M.A.P
Pembina
NIP 19700707 200003 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.4 Struktur Organisasi	13
1.5 Sumber Daya.....	14
1.6 Sumber Daya.....	15
1.7 Isu Strategis.....	16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 19
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Visi dan Misi	19
2.2.1 Visi	19
2.2.2 Misi.....	20
2.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.5 Indikator Kinerja.....	28
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
2.7 Perencanaan Anggaran	32
2.8 Rencana Kinerja Tahunan.....	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 38
3.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Capaian Kinerja Dinas Perikanan	39
3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ...	39
3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu.....	41
3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD.....	43
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	46
3.4.1 Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	46
3.4.2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	47
3.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	48
3.4.4 Produksi Perikanan Tangkap	48
3.4.5 Produksi Perikanan Budidaya.....	49
3.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	50
3.5 Realisasi Anggaran.....	52



BAB IV P E N U T U P.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Pemecahan Masalah	57
4.3 Tindak Lanjut	58
 LAMPIRAN.....	 59



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pemanfaatan sumber daya publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian empat sasaran strategis pembangunan sektor perikanan, yaitu: meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya produksi perikanan tangkap, meningkatnya produksi perikanan budidaya, serta meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui enam indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, beberapa indikator menunjukkan capaian yang cukup baik. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan menunjukkan kinerja yang melampaui target dengan realisasi sebesar 3,46 % dari target 3,4 %, atau mencapai 102 %. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain itu, indikator Produksi Perikanan Tangkap juga menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 9.100 ton dari target 9.000 ton, atau mencapai 101 %. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di wilayah Kabupaten Nias Selatan masih berjalan secara optimal serta didukung oleh potensi sumber daya perikanan yang cukup tersedia.

Indikator Produksi Perikanan Budidaya menunjukkan capaian yang relatif baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 39 ton, realisasi yang dicapai sebesar 38 ton atau mencapai 97 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha budidaya perikanan di daerah masih berjalan dan memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan, meskipun masih memerlukan peningkatan dukungan dalam pengembangan sarana produksi, peningkatan kapasitas pembudidaya, serta penguatan sistem pendampingan teknis.



Di sisi lain, beberapa indikator kinerja masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan mencatat realisasi sebesar 62,38 % dari target 90 %, dengan tingkat capaian sebesar 69 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fluktuasi harga hasil tangkapan, meningkatnya biaya operasional melaut, serta keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Hal yang serupa juga terlihat pada indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang mencatat realisasi sebesar 65,95 % dari target 88 %, atau mencapai 75 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan biaya produksi usaha budidaya, keterbatasan sarana produksi, serta fluktuasi harga produk budidaya di pasar.

Sementara itu, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) menunjukkan capaian yang masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari target sebesar 45 kg/kapita/tahun, realisasi yang dicapai sebesar 22,91 kg/kapita/tahun, atau sekitar 51 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program sosialisasi dan promosi konsumsi ikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap produk perikanan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan beberapa program utama, antara lain Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, disertai dengan program penunjang penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan, skala usaha pelaku usaha perikanan yang masih relatif kecil, fluktuasi harga input produksi, serta keterbatasan akses pasar bagi produk perikanan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan dinamika pasar juga turut mempengaruhi capaian kinerja sektor perikanan.

Sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan akan terus melakukan penguatan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk, serta peningkatan promosi konsumsi ikan melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Selain itu, penguatan sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja juga akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan.



Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta melakukan penegakan supremasi hukum. Kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan nilai-nilai ideal akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengawasan yang efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (berkala).

Dengan realitas tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas capaian hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Nias Selatan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaankinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dalam penyusunan laporan ini mengacu kepada :

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
- 5) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan;
- 6) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan;
- 7) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- 9) Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas PerikananKabupaten Nias Selatan dengan Bupati Nias Selatan Tahun 2024.



1.2 Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Government* yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perikanan Nias Selatan.
2. Mendorong Dinas Perikanan Nias Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketetapan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Tugas dan fungsi dinas ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan



daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang inklusif dan adaptif. Tugas dan fungsi dari masing-masing structural tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
 - b) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c) Pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - d) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - e) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - f) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - g) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama dengan Menteri Teknis.
2. Sekretariat Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan kerumahtanggaan, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengkoordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - b) Pengkoordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - c) Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
 - d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f) Penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang –undangan;
 - g) Penyelenggaraan pengeloalaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - h) Penyelenggaraan pengeloalaan barang milik negara/daerah dan layanan
 - i) pengadaan barang/jasa;



- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - c) Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - f) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
 - g) Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
 - h) Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
 - i) Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - j) Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
 - k) Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
 - l) Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang perikanan;
 - m) Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - n) Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
 - p) Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
 - q) Menyusun konsep pembuatan profil dinas;



- r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang- undangan;
 - c) Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
 - d) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup dinas;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - f) Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) Mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
 - h) Mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
 - i) Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
 - j) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai Merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan dinas;
 - k) Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
 - l) Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
 - m) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
 - n) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan



usaha kecil pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program lingkup pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut:

- 1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan;
 - b) Melakukan pendidikan dan pelatihan bidang berbasis sertifikasi kompetensi (keahlian dan keterampilan) baik formal dan informal serta pemagangan;
 - c) Melakukan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - d) Melakukan pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang perikanan;
 - e) Melakukan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi perikanan;
 - f) Melakukan pendampingan usaha perikanan;
 - g) Melakukan kerjasama alih teknologi perikanan;
 - h) Melakukan fasilitasi penyediaan informasi perikanan meliputi potensi sumberdaya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, wabah penyakit ikan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemberian subsidi perikanan dan bantuan modal;
 - i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan; dan



- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- 2) Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala S Seksi Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan fasilitasi kemitraan usaha perikanan baik tahapan usaha (praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran dan pengembangan), pola kemitraan (inti plasma, perdagangan umum, bagi hasil dan kerjasama operasional) maupun cangkupan kemitraan (keterampilan manajemen dan teknis, pemasaran, permodalan, SDM, teknologi, tata niaga, rantai pasok, CSR dan bina lingkungan);
 - b) Melakukan fasilitasi kemitraan usaha dalam perjanjian tertulis;
 - c) Melakukan pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan;
 - d) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
 - e) Melakukan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan melalui pinjaman modal, sarana dan prasarana usaha perikanan, pemberian subsidi biaya kredit/ imbal jasa penjaminan, pemanfaatan dana CSR dari badan usaha;
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan., Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan perikanan meliputi pranata sosial berdasarkan budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, dan badan usaha perikanan;
 - b) Melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan meliputi tata cara budidaya, tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan usaha dan pengelolaan permodalan;
 - d) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan;



- e) Melakukan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan perikanan dengan pusat pelayanan usaha terpadu daerah;
 - f) Melakukan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan,
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) Pengkoordinasian, fasilitasi perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang usahanya 10 dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pemasaran hasil perikanan;
 - b) Pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - c) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - d) Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - e) Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pemasaran hasil perikanan; dan
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut:

- 1) Seksi Penerbitan SIUP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penerbitan SIUP memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan perikanan;
 - b) melaksanakan penyiapan SIUP di bidang pembudidayaan ikan skala kecil yang usahanya dalam satu kabupaten;



- c) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan perikanan;
 - d) melaksanakan penyelenggaraan urusan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerbitan SIUP;
 - e) mengumpulkan data, mengidentifikasi, dan menganalisis kebutuhan penyelenggaraan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan perikanan;
 - f) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- 2) Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penerbitan SIUP Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - b) melaksanakan Penyiapan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - c) melaksanakan Penyiapan Penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - d) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - e) melaksanakan penyelenggaraan urusan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) mengumpulkan data, mengidentifikasi, dan menganalisis kebutuhan penyelenggaraan perizinan usaha perikanan meliputi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) serta perizinan perikanan lainnya;
 - g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki uraian tugas sebagai berikut:



- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan program sebagai pedoman kerja;
 - b) Melaksanakan pengumpulan data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c) Melaksanakan pengidentifikasian data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d) Melaksanakan analisis data untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f) Melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana dan program lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya;



- b) Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan dan pembudidayaan ikan berdasarkan RTRW;
 - c) Menyiapkan data dan informasi teknis pengelolaan kawasan dan pembudidayaan Ikan;
 - d) Memproses penetapan dan melakukan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - e) Melaksanakan pengembangan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
 - f) Melaksanakan tugas koordinasi menyangkut teknis pengelolaan kawasan Budidaya;
 - g) Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan; dan
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- 2) Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) Melakukan pengelolaan standar teknis air dan lahan;
 - b) Melakukan pengembangan pemanfaatan air dan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - c) Melakukan pembinaan saluran;
 - d) Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam tata pemanfaatan air dan lahan;
 - e) Melakukan pengendalian penyakit ikan;
 - f) Melakukan pengelolaan cara pembuatan pakan yang baik;
 - g) Melakukan survailen mutu pakan ikan;
 - h) Melakukan pengelolaan cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - i) Melakukan survailen mutu obat ikan;
 - j) Melakukan pengendalian obat ikan;
 - k) Melakukan pengendalian residu;
 - l) Melakukan pengendalian lingkungan budidaya ikan;
 - m) Melakukan rehabilitasi lingkungan budidaya ikan;
 - n) Melakukan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - o) Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

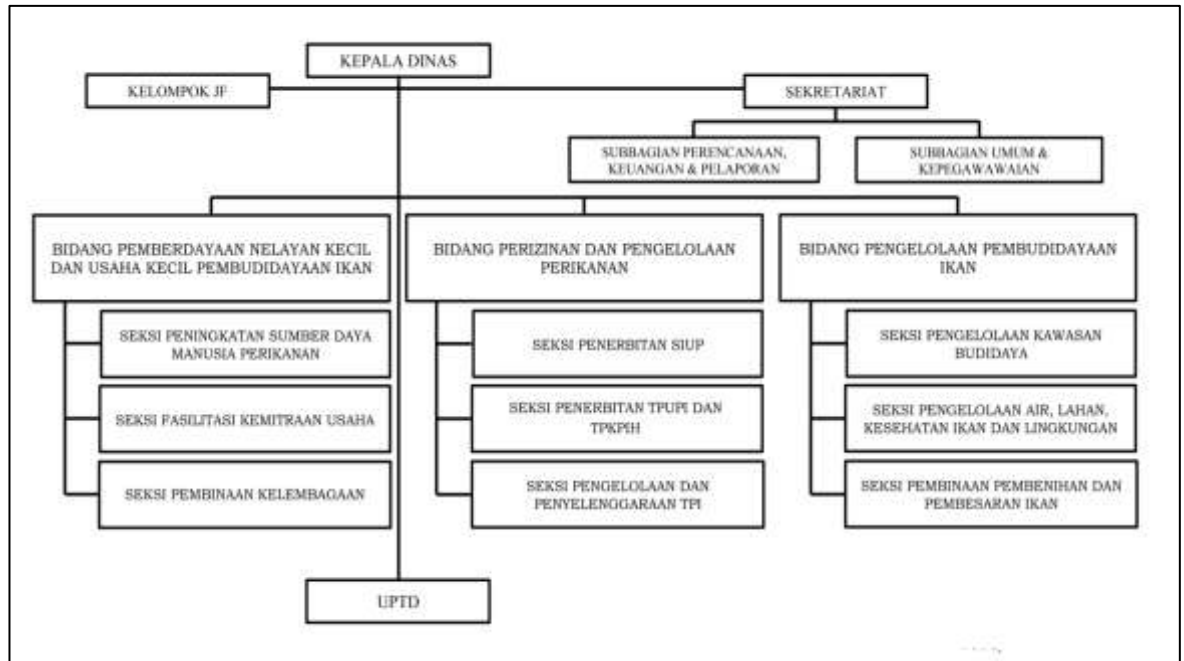


- 3) Seksi Pembinaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan kebijakan pembangunan dan kebijakan teknis Balai Benih Ikan dan Hatchery;
 - b) Menumbuhkembangkan UPR di setiap desa/kelurahan;
 - c) Memfasilitasi penyiapan induk ikan;
 - d) Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berlaku di BBI, Hatchery dan UPR;
 - e) Memfasilitasi pemasaran ikan termasuk pembesaran dan pembenihan ikan;
 - f) Melaksanakan pengembangan komoditas ikan yang akan dibudidayakan;
 - g) Menyusun perencanaan teknis kebutuhan sarana pembenihan; dan
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, membawahi:
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan;
 - 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha;
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- d) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Penerbitan SIUP;
 - 2. Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH;
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- e) Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air, Lahan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Pembinaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan.
- f) Pejabat Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

1.5 Sumber Daya

Ketersediaan dan kapasitas sumber daya merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang operasional dinas. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia yang kompeten dan terdistribusi secara proporsional sangat menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Di sisi lain, dukungan anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan program strategis secara optimal. Adapun keberadaan fasilitas dan peralatan pendukung menjadi aspek penting dalam menjangkau layanan hingga ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Nias Selatan. Evaluasi terhadap kapasitas sumber daya juga menjadi bagian penting dari perencanaan strategis, guna mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas organisasi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mempunyai personil sebanyak 14 orang yang berstatus PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a) Berdasarkan Golongan

- Golongan IV : 2 Orang
- Golongan III : 12 Orang
- Golongan II : -
- Golongan I : -



b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

- Strata-2 (S2) : 3 Orang
- Strata-1 (S1) : 10 Orang
- SLTA : 1 Orang

Selain personil yang berstatus PNS, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan juga dibantu oleh Tenaga Penyuluh Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan pada masing-masing bidang.

1.6 Sumber Daya

Dalam menunjang kegiatan operasional, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki sejumlah asset sarana dan prasarana yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis	Jumlah	Satuan.
1	Bangunan Gedung Kantor	2	Unit
2	Bangunan TPI	1	Unit
3	Pelabuhan TPI	1	Unit/Dermaga
4	Kendaraan Roda 2	4	Unit
5	Kendaraan Roda 4	1	Unit
6	Komputer PC	7	Unit
7	Laptop/Notebook	3	Unit
8	Printer	5	Unit
9	Filling cabinet	3	Buah
10	Lemari Dokumen	8	Buah
11	Meja Kerja	18	Unit
12	Brankas	1	Unit
13	Meja Rapat	4	Unit
14	Kursi Kerja	20	Unit
15	Kusi Plastik	30	Buah
16	LCD Projector	1	Set
17	Televisi	3	Unit
18	Kamera DLSR	1	Unit
19	Drone	1	Unit
20	Sound system	1	Set



1.7 Isu Strategis

Pembangunan perekonomian kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2026.

Pembangunan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengkajian data, evaluasi dan analisa serta observasi lapangan dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis dan membutuhkan pemecahan masalah kedepannya yakni sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil :
 - a. tidak adanya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pasca terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat melakukan intervensi secara langsung baik dalam bentuk penindakan atas pelanggaran pengelolaan SDKP;
 - b. Minimnya koordinasi lintas stakeholder terkait kerjasama atau dukungan pengawasan SDKP;
 - c. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Masih adanya aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRAL) terutama *Destructive fishing* di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



2. Pengelolaan Perikanan Tangkap :
 - a. Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
 - b. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
 - c. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan keterbatasan suplai kebutuhan BBM yang disebabkan oleh tidak adanya SPBN terutama di wilayah kepulauan;
 - d. Tidak adanya kantor layanan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan dengan kapal penangkap ikan pada ukuran tersebut kesulitan dalam melakukan mengurus perizinan dan pendaftaran kapal.
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan :
 - a. Meningkatnya harga pakan ikan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 - b. Belum adanya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c. Sarana dan prasarana standard pembudidayaan ikan masih terbatas dengan pembudidayaan ikan yang masih tradisional;
 - d. Sumber induk dan bibit unggul komoditas ikan budidaya masih terbatas;
 - e. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pembudidayaan ikan masih terbatas.
 - f. Kesulitan layanan Standarisasi manajemen pengelolaan mutu (MPM) oleh pelaku usaha pembudidayaan ikan.
4. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan :
 - a. Sarana dan prasarana pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas;
 - b. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
 - c. Layanan pengujian kelayakan produk tidak ada di Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Kabupaten Nias Selatan;
 - e. Belum adanya UPI dan supplier yang memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP;
 - f. Sebagian besar wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki akses listrik sehingga kesulitan dalam melakukan pengawetan produk perikanan dalam bentuk pembekuan/pendinginan.



5. Hukum dan Kelembagaan :
 - a. Lemahnya penataan dan penegakkan hukum.
 - b. Tidak tersedianya sistem informasi dan manajemen *database* pengelolaan perikanan dan kelautan.
 - c. Lemahnya peranan kelembagaan ekonomi dalam memberdayakan SDM Kelautan dan perikanan.
6. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 - a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan baik dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi.
 - b. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir.
 - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan.
 - d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan.
7. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir
 - a) Ancaman abrasi dan sedimentasi.
 - b) Mitigasi bencana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 berupaya untuk menyelesaikan isu lokal dan nasional maupun global seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2045 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan



tahun 2021 – 2026 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”.

Penjabaran Visi ini selanjutnya diuraikan dalam Misi dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029.

2.2.2 Misi

Visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 akan ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
- 3) Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
- 4) Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
- 6) Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan keenam misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu pada misi Ke-4:

Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal.

Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2025 – 2029 yaitu: ***Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.*** Tujuan ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai selama periode Renstra, sesuai dengan peran Dinas Perikanan dalam mengelola sumber daya perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara menyeluruh.



2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang ingin dicapai, dengan indikator yang lebih terukur, realistis, dan relevan dalam jangka waktu lima tahun. Sub bab ini memuat rumusan sasaran pembangunan Dinas Perikanan yang menggambarkan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang diharapkan terjadi selama periode Renstra. Setiap sasaran dirancang untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menjadi dasar perumusan program, kegiatan, serta pengukuran kinerja perangkat daerah. Adapun sasaran yang ditetapkan adalah: **Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan.**

Untuk mencapai sasaran tersebut dan mewujudkan tujuan strategis, upaya-upaya harus dilakukan mencakup:

- a. Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas Sumber Daya (Produksi). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkap dan budidaya ikan secara efisien dan bertanggung jawab, dengan cakupan meliputi peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, serta pengembangan kawasan sentra produksi;
- b. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk (Pengolahan & Pemasaran). Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan harga jual dan pangsa pasar produk perikanan Kabupaten Nias Selatan, dengan cakupan meliputi penguatan mutu dan standardisasi produk dan peningkatan akses pasar;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan (Keberlanjutan). Upaya ini merupakan inti dari sasaran berkelanjutan, memastikan sumber daya tetap tersedia untuk generasi mendatang. Upaya ini mencakup implementasi pengelolaan perikanan berbasis desa dan penerapan kebijakan berbasis data.

Sebagaimana kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029, berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perikanan, disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya local.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan.		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	90	92	94	96	98	100	-
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	88	90	92	94	96	98	
		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi sector Perikanan (%)	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	



2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan, sedangkan arah kebijakan memastikan pelaksanaan strategi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan strategi yang termuat dalam RPJMD yakni **Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Pengelolaan Pertanian dan Perikanan yang Berkelanjutan** dan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan, sarana dan prasarana dan pengelolaan berbasis potensi wilayah;
- 2) Mengembangkan perikanan budidaya berbasis kawasan yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan, serta mendorong ketahanan pangan dengan pemanfaatan potensi lokal;
- 3) Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan, standarisasi mutu, dan penguatan akses pasar;
- 4) Mewujudkan pemerataan layanan perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Meningkatkan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan, serta penguatan kelembagaan;
- 6) Mendorong keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyuluhan, konservasi, kontribusi dalam pengawasan dan pelibatan masyarakat;
- 7) Memperkuat sistem informasi dan digitalisasi pelayanan sektor kelautan dan perikanan;
- 8) Menginisiasi dan memperkuat kerjasama lintas sector dalam pengendalian aktivitas penangkapan ikan merusak (*destructive fishing*) dan konservasi lingkungan pesisir berbasis masyarakat.

Selanjutnya, penyusunan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen ini. Setiap arah kebijakan dirancang untuk menjawab kebutuhan yang nyata dan relevan di lapangan, serta menjadi instrumen pengarah bagi program dan kegiatan agar berjalan secara terfokus, terukur, dan berdampak langsung terhadap capaian tujuan pembangunan. Arah kebijakan ini menjadi kerangka operasional dari strategi yang telah ditetapkan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berada dalam jalur pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam perumusannya, arah kebijakan disusun untuk mendukung pencapaian target kinerja pada tingkat *outcome*, yaitu peningkatan produksi, nilai tambah, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.



Dalam rangka menjamin keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan pelaksanaan teknis di tingkat perangkat daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) secara sistematis dan terintegrasi. Operasionalisasi NSPK bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan berjalan sesuai dengan kaidah teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan menjadi arah pembangunan daerah yang harus diterjemahkan secara konkret ke dalam Renstra masing-masing perangkat daerah. Untuk itu, Dinas Perikanan menyusun keterkaitan antara NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra PD guna memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan berlangsung secara efisien, terukur, dan tepat sasaran.

**Tabel 2.2 Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2029**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.	• Pengelolaan perikanan tangkap sesuai potensi wilayah dan ramah lingkungan; • Pengembangan budidaya efisien dan adaptif berbasis potensi lokal	○ Fokus pada peningkatan kapasitas sarana prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; ○ Pengembangan sentra perikanan berbasis desa berdasarkan potensi local.
	Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok untuk Ketahanan Pangan Masyarakat.	• Penguatan sistem logistik ikan, pemasaran, dan intervensi harga di sentra produksi; • Peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan, standarisasi mutu, dan penguatan akses pasar;	



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan.	• Penguatan Infrastruktur Pendukung dan Kelembagaan Sektor Perikanan. • Peningkatan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan, serta penguatan kelembagaan; • Memperkuat sistem informasi dan digitalisasi pelayanan sektor kelautan dan perikanan;	

Tabel diatas memuat hubungan antara implementasi NSPK, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebijakan operasional perangkat daerah, disertai dengan penjelasan singkat mengenai kontribusi masing-masing arah kebijakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaanya, dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dalam rentang waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kesiapan sumber daya, dan kapasitas pelaku utama sektor perikanan. Pentahapan ini juga disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah dan target kinerja tahunan perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari perencanaan program dan pendanaan yang sistematis, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan juga menetapkan sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian outcome strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta kemampuan kegiatan tersebut dalam menjawab isu-isu kunci pembangunan



sektor kelautan dan perikanan, seperti produktivitas, nilai tambah, penguatan kelembagaan nelayan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan sumber daya.

Tabel berikut menyajikan daftar sub kegiatan prioritas yang telah dipetakan berdasarkan keterkaitannya dengan program prioritas daerah, serta mencantumkan *outcome* yang diharapkan dan rincian kegiatan atau sub kegiatan yang relevan.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
I	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
A			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
1			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
2			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
3			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
B			<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
1			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
2			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
3			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
C			<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	
1			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
2			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	



No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
II	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
A			<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	
1			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
2			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
3			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
4			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
B			<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	
1			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
III	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)		
A			<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	
1			Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
2			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	



No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
B			<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	
1			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
C			<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
1			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2			Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
3			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
4			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
D			<i>Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</i>	
1			Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan, daya saing produk kelautan dan perikanan	

Selanjutnya, untuk keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Astacita, 17 Program Prioritas Nasional serta program prioritas provinsi dapat dilihat pada table berikut ini.

2.5 Indikator Kinerja

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan berjalan secara efektif dan terukur, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Oleh karena itu, perangkat daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja yang terintegrasi.



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian tujuan utama organisasi, dan menunjukkan dampak langsung pembangunan sektor perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. IKU bersifat makro dan menjadi tolok ukur strategis dalam evaluasi Renstra Dinas Perikanan. Adapun IKU Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN): Menggambarkan tingkat daya beli nelayan melalui perbandingan antara harga yang diterima dan harga yang dibayarkan dalam kegiatan perikanan tangkap.
- 2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi): Menggambarkan kesejahteraan pembudidaya ikan dari sisi rasio pendapatan terhadap biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.
- 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%): Mengukur kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam produk domestik regional bruto (PDRB).

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator teknis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran dan output program/kegiatan, serta menjadi komponen penting dalam pelaporan kinerja tahunan perangkat daerah. IKK digunakan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja secara langsung pada tingkat operasional. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan meliputi:

- a) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton): Menggambarkan volume hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dalam satu tahun.
- b) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton): Menunjukkan total produksi ikan dari kegiatan budidaya air tawar maupun laut.
- c) Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun): Menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan gizi.

Penetapan IKU dan IKK ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan kinerja yang lebih fokus, akuntabel, dan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan. Dengan pengukuran kinerja yang tepat, Dinas Perikanan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel berikut menyajikan daftar IKU dan IKK Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, lengkap dengan satuan pengukuran dan deskripsi singkat masing-masing indikator yang relevan.



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ...						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	90	92	94	96	98	100	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	88	90	92	94	96	98	
3	Laju pertumbuhan ekonomi sector Perikanan (%)	%	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ...						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	8800	9500	10000	10500	11000	11500	
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	39	40	42	45	48	50	
3	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	%	3,6	47	50	53	56	59	

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja dan perubahannya pada Tahun 2024.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP Evaluasi Internal	A	Predikat
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	4,15-5,33	%
		Nilai Produksi perikanan tangkap	275	Milyar/ Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	4,00	Milyar/ Rupiah

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	90	%
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	88	%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	3,4	%

2.7 Perencanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator perjanjian kinerja, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mewujudkannya dalam 4 (empat) program kegiatan dengan indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dengan dukungan belanja anggaran langsung (APBD) sebesar **Rp. 2.161.416.471,14.-** dengan realisasi sebagaimana diuraikan pada table berikut ini.

Tabel 2.7 Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Uraian	Indikator	Target	Anggaran APBD (Rp.)	Anggaran Perubahan P-APBD (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	902.256.893,50	618.098.232,14
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8.750 Ton/ Tahun	1.171.185.532,50	1.335.113.260,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	39 Ton/ Tahun	269.052.468,00	189.324.900,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumnsi makan ikan	2.700 ton/Tahun	37.505.106,00	18.880.079,00

2.8 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun ketiga sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang meliputi penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini.

**Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan BMD yang akuntabel dan transparan		100%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nias Selatan	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nias Selatan	2 Dokumen
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nias Selatan	2 Dokumen
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nias Selatan	2 Dokumen
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nias Selatan	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%tase AdminstrasiKepegawaia PerangkatDaerah	Nias Selatan	100%
3.25.01.2.05.0002 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%tase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Nias Selatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian
1	2	3	4	5
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan
3.25.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		4 dokumen
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Nias Selatan	
3.25.01.2.07.0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nias Selatan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	Nias Selatan	10 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian
1	2	3	4	5
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap		8750 ton/ tahun
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cakupan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah yang dikelola	Nias Selatan	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		20 Unit
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		25 Unit
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Nelayan kecil yang memperoleh pemberdayaan	Nias Selatan	25 Kelompok
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		50 Orang
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		12 Kelompok
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya		45 ton/ tahun
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapatkan pemberdayaan	Nias Selatan	30 Kelompok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian
1	2	3	4	5
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		10 Kelompok
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		25 Kelompok
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		25 Kelompok
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan penyediaan data, sarana, prasarana, lingkungan budidaya dan luasan lahan Pembudidayaan Ikan yang dikelola	Nias Selatan	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15 Unit
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20 unit
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		1 Dokumen
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		25 Orang
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		2700 ton/ tahun
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Penyediaan data dan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Nias Selatan	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian
1	2	3	4	5
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Nias Selatan	
3.25.06.2.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		25 Unit Usaha
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Nias Selatan	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		50 ton
3.25.06.2.03.00022	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		20 Pelaku Usaha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab tugas pokok yang menjadi kewenangannya. Capaian kinerja dapat dihitung melalui proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Bupati Nias Selatan.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana pada **Tabel 3.1** berikut ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Predikat	Interprestasi
1.	AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan
2.	A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan
3.	BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik
4.	B (Nilai >60 – 70)	Cukup (memadai)
5.	CC (Nilai <50 – 60)	Sangan Rendan
6.	C (Nilai >30 – 50)	Kurang
7.	D (Nilai 0 – 30)	Sangat Kurang

Adapun pengukuran pencapaian kinerja dimaksud adalah membandingkan target dan realisasi dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Perikanan

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan pada awal tahun dengan realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun pelaporan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi indikator yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan upaya peningkatan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	90	62,38	69%	Diskan Kab. Nias Selatan	IKU
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	88	65,95	75%	Diskan Kab. Nias Selatan	IKU
		Laju pertumbuhan ekonomi sector Perikanan	%	3,4	3,46	102%	BPS Kab. Nias Selatan	IKU
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9000	9100	101%	Valnas Satu Data KP	IKU RPJMD 2021-2026/ IKK RPJMD 2025-2029
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39	38	97%	Valnas Satu Data KP	IKU RPJMD 2021-2026/ IKK RPJMD 2025-2030
4	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	45	22,91	51%	Diskan Kab. Nias Selatan	IKU RPJMD 2021-2026/ IKK RPJMD 2025-2031

Berdasarkan **Tabel 3.2** Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, dapat diketahui tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Tabel tersebut menggambarkan perbandingan antara target kinerja yang telah direncanakan dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pada sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan, capaian kinerja diukur melalui tiga indikator utama yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 62,38 %, sehingga tingkat capaian indikator ini mencapai 69 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dan masih memerlukan berbagai upaya peningkatan melalui penguatan program pemberdayaan nelayan serta peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan.

Indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) ditargetkan sebesar 88 %, dengan realisasi sebesar 65,95 %, sehingga tingkat capaian mencapai 75 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan masih belum optimal dan memerlukan dukungan melalui peningkatan produktivitas usaha budidaya, efisiensi biaya produksi, serta penguatan akses pasar terhadap hasil produksi perikanan budidaya.

Sementara itu, indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 3,4 %, realisasi yang dicapai sebesar 3,46 %, sehingga tingkat capaian mencapai 102 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi salah satu sektor yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap, indikator Produksi Perikanan Tangkap ditargetkan sebesar 9.000 ton, dengan realisasi sebesar 9.100 ton, sehingga tingkat capaian mencapai 101 %. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Nias Selatan berjalan dengan baik serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang tersedia secara cukup optimal.

Selanjutnya pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan budidaya, indikator Produksi Perikanan Budidaya ditargetkan sebesar 39 ton dengan realisasi sebesar 38 ton, sehingga tingkat capaian mencapai 97 %. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha budidaya perikanan di daerah tetap berjalan dan memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan secara keseluruhan.

Pada sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) ditargetkan sebesar 45 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 22,91 kg/kapita/tahun, sehingga tingkat capaian baru mencapai 51 %. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang bergizi.

Perlu diketahui bahwa pada beberapa tabel perbandingan kinerja, terdapat data yang tidak tersedia atau ditandai dengan N/A. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029, sehingga indikator tersebut belum digunakan atau belum dihitung pada periode perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, data pembandingan pada tahun sebelumnya tidak tersedia.

Secara umum, berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Produksi Perikanan Tangkap. Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pelaku usaha perikanan serta tingkat konsumsi ikan masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu

Dalam rangka mengevaluasi perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, perlu dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pada tahun pelaporan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tren peningkatan maupun penurunan kinerja pada setiap indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu, analisis perbandingan ini juga menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan pada periode perencanaan berikutnya.

Pada Tabel 3.3 berikut menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2024 serta tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja dalam sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Perlu dicatat bahwa beberapa indikator tidak memiliki data capaian pada tahun sebelumnya (N/A), karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang digunakan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 sehingga belum dihitung pada periode RPJMD sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi		Tingkat Capaian
					2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	90	N/A	62,38	69%
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	88	N/A	65,95	75%
		Laju pertumbuhan ekonomi sector Perikanan	%	3,4	N/A	3,46	102%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9000	8630	9100	5%
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39	36,7	38	4%
4	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	45	N/A	22,91	51%

Berdasarkan **Tabel 3.3** Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu, dapat diketahui perkembangan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tren perkembangan kinerja serta mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan capaian pada masing-masing indikator.

Pada Tahun 2025, indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan realisasi sebesar 62,38 % dengan tingkat capaian terhadap target sebesar 69 %. Sementara itu, indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencatat realisasi sebesar 65,95 % dengan tingkat capaian sebesar 75 %. Adapun indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan menunjukkan realisasi sebesar 3,46 % atau mencapai 102 % dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap, indikator Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, realisasi produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 8.630 ton, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 9.100 ton. Dengan demikian, terjadi peningkatan produksi sebesar 470 ton atau sekitar 5 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan aktivitas penangkapan ikan serta pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan budidaya, indikator Produksi Perikanan Budidaya juga menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi produksi perikanan budidaya pada Tahun 2024 tercatat sebesar 36,7 ton, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 38 ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi sebesar 1,3 ton atau sekitar 4 % dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perkembangan usaha budidaya perikanan di daerah meskipun masih memerlukan peningkatan produktivitas agar dapat mencapai target yang ditetapkan secara optimal.

Sementara itu, pada sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 22,91 kg/kapita/tahun dengan tingkat capaian terhadap target sebesar 51 %. Data realisasi pada tahun sebelumnya tidak tersedia karena indikator ini juga merupakan indikator yang digunakan dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029, sehingga belum dihitung pada periode perencanaan sebelumnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Namun demikian, indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan pelaku usaha perikanan serta tingkat konsumsi ikan masyarakat masih memerlukan perhatian lebih melalui penguatan program pemberdayaan, peningkatan nilai tambah produk perikanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan.

3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Dalam rangka menilai perkembangan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, perlu dilakukan pengukuran tingkat kemajuan kinerja terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan sektor perikanan yang direncanakan dalam periode perencanaan.

Melalui perbandingan ini dapat diketahui tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program serta perumusan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	100	62,38	62%	Diskan Kab. Nias Selatan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	%	98	65,95	67%	Diskan Kab. Nias Selatan
		Laju pertumbuhan ekonomi sector Perikanan	%	4,6	3,46	75%	BPS Kab. Nias Selatan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11500	9100	79%	Valnas Satu Data KP
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	50	38	76%	Valnas Satu Data KP
4	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapit a/tahun	59	22,91	39%	Diskan Kab. Nias Selatan

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target RPJMD, dapat diketahui tingkat kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja pada Tahun 2025 telah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan sektor perikanan dalam jangka menengah.

Pada sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perikanan secara berkelanjutan, capaian kinerja diukur melalui tiga indikator utama yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan. Untuk indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), target akhir Renstra ditetapkan sebesar 100 %, sedangkan realisasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 62,38 %, sehingga tingkat kemajuan capaian

mencapai 62 % dari target akhir yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan nelayan masih memerlukan berbagai intervensi program yang lebih optimal agar target jangka menengah dapat tercapai.

Indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) memiliki target akhir Renstra sebesar 98 %, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 65,95 %, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 67 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan pembudidaya ikan mengalami perkembangan namun masih berada pada tingkat yang perlu ditingkatkan melalui penguatan produktivitas usaha budidaya, peningkatan efisiensi biaya produksi, serta penguatan akses pasar terhadap hasil produksi perikanan budidaya.

Sementara itu, indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan memiliki target akhir Renstra sebesar 4,6 %, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 3,46 %, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 75 %. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun masih diperlukan upaya penguatan pengelolaan potensi perikanan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap, indikator Produksi Perikanan Tangkap memiliki target akhir Renstra sebesar 11.500 ton, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 9.100 ton, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 79 % dari target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap telah mendekati target yang direncanakan, yang mencerminkan bahwa kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan serta pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Nias Selatan berjalan dengan cukup baik.

Selanjutnya pada sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan budidaya, indikator Produksi Perikanan Budidaya memiliki target akhir Renstra sebesar 50 ton, dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 38 ton, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 76 % dari target akhir yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha budidaya perikanan di daerah telah berkembang namun masih memerlukan peningkatan dukungan melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas pembudidaya, serta penguatan sistem pendampingan teknis.

Sementara itu, pada sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) memiliki target akhir Renstra sebesar 59 kg/kapita/tahun, sedangkan realisasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 22,91 kg/kapita/tahun, sehingga tingkat kemajuan capaian baru mencapai 39 % dari target jangka menengah. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat masih relatif rendah dan memerlukan upaya yang lebih intensif melalui program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan, penguatan kampanye Gemarikan (Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan), serta peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas produk perikanan bagi masyarakat.

Secara umum, berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir RPJMD, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik menuju target jangka menengah. Indikator produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, serta laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan menunjukkan tingkat kemajuan yang relatif tinggi. Namun demikian, indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat masih memerlukan perhatian lebih melalui penguatan program pemberdayaan, peningkatan nilai tambah produk perikanan, serta pengembangan strategi peningkatan konsumsi ikan di masyarakat.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis terhadap capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini mencakup faktor internal yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta faktor eksternal yang berasal dari kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk merumuskan alternatif solusi strategis guna meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya sehingga tercapai perbaikan kinerja secara berkelanjutan dalam pembangunan sektor perikanan daerah.

3.4.1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh nelayan dari hasil penjualan produk perikanan dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan usaha penangkapan ikan. Nilai NTN yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan nelayan relatif lebih baik dibandingkan dengan pengeluaran yang harus ditanggung.

Pada Tahun 2025, indikator NTN menunjukkan tingkat capaian yang belum optimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kemampuan daya beli nelayan.

Dari hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini. Faktor internal antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan, rendahnya produktivitas usaha penangkapan ikan yang masih berskala kecil, serta keterbatasan akses nelayan terhadap teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien. Selain itu, kapasitas

kelembagaan kelompok nelayan juga masih perlu diperkuat agar mampu meningkatkan posisi tawar nelayan dalam kegiatan usaha perikanan.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain fluktuasi harga bahan bakar yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional melaut, kondisi cuaca dan musim yang mempengaruhi intensitas kegiatan penangkapan ikan, serta fluktuasi harga hasil tangkapan di pasar yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan.

Sebagai upaya peningkatan capaian indikator NTN, alternatif solusi yang dilakukan antara lain melalui penguatan program pemberdayaan nelayan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih efisien dan mampu memberikan nilai tambah bagi nelayan.

3.4.2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan melalui perbandingan antara harga yang diterima oleh pembudidaya dari hasil penjualan produk budidaya dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha budidaya perikanan.

Pada Tahun 2025, capaian indikator NTPi menunjukkan kondisi yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kegiatan usaha budidaya perikanan.

Berdasarkan hasil analisis, faktor internal yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain keterbatasan jumlah pembudidaya ikan yang aktif, produktivitas usaha budidaya yang belum optimal, serta keterbatasan sarana produksi seperti benih dan pakan berkualitas. Selain itu, kemampuan manajemen usaha budidaya pada sebagian pembudidaya masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi capaian indikator ini meliputi fluktuasi harga pakan yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi, risiko serangan penyakit ikan yang dapat menurunkan tingkat produksi, serta keterbatasan akses pasar bagi produk perikanan budidaya.

Untuk meningkatkan capaian indikator NTPi, alternatif solusi yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pembinaan teknis kepada pembudidaya ikan, penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya, peningkatan akses terhadap sarana produksi budidaya, serta pengembangan sistem pemasaran produk budidaya agar mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi pembudidaya.

Alternatif solusi yang dilakukan antara lain peningkatan pembinaan teknis kepada pembudidaya, penguatan kelompok pembudidaya ikan, peningkatan akses terhadap sarana produksi budidaya, serta pengembangan sistem pemasaran produk budidaya yang lebih efisien.

3.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan

Laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan indikator yang menggambarkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator ini menunjukkan perkembangan nilai tambah sektor perikanan dalam struktur perekonomian daerah dari waktu ke waktu.

Pada Tahun 2025, indikator ini menunjukkan capaian yang cukup baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

Beberapa faktor internal yang mendukung capaian indikator ini antara lain pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan yang berjalan dengan baik, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta dukungan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan.

Sementara itu, faktor eksternal yang turut mendukung capaian indikator ini meliputi potensi sumber daya perikanan yang cukup besar serta permintaan pasar terhadap produk perikanan yang relatif stabil.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini, alternatif solusi yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk, serta penguatan sistem pemasaran produk perikanan.

3.4.4 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang menggambarkan jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan di perairan laut maupun perairan umum dalam satu periode tertentu yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini mencerminkan tingkat produktivitas kegiatan perikanan tangkap serta pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang tersedia.

Capaian indikator produksi perikanan tangkap pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik karena realisasi produksi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain potensi sumber daya perikanan yang masih cukup besar di wilayah perairan Kabupaten Nias Selatan serta kondisi perairan yang relatif mendukung kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, meningkatnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi.

Dari sisi internal, dukungan program pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas nelayan seperti pembinaan kepada nelayan, dukungan sarana penangkapan, serta peningkatan kapasitas nelayan turut memberikan kontribusi terhadap capaian indikator ini.

Meskipun demikian, peningkatan produksi perikanan tangkap perlu tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya perikanan agar tidak

menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap ekosistem perairan. Oleh karena itu, alternatif solusi yang perlu dilakukan antara lain melalui penerapan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penguatan sistem pendataan produksi perikanan tangkap, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

3.4.5 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya merupakan indikator yang menggambarkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan melalui kegiatan budidaya perikanan dalam berbagai sistem budidaya selama satu periode tertentu yang diukur dalam satuan ton. Indikator ini mencerminkan perkembangan usaha budidaya perikanan serta kontribusinya terhadap produksi perikanan daerah.

Capaian indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Peningkatan produksi budidaya dipengaruhi oleh berkembangnya kegiatan budidaya ikan di masyarakat serta adanya dukungan program pemerintah dalam pengembangan usaha budidaya perikanan.

Namun demikian, pembudidaya ikan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan benih ikan berkualitas, tingginya harga pakan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi budidaya yang lebih efisien. Selain itu, faktor lingkungan seperti kualitas air dan kondisi cuaca juga mempengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan budidaya.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan program pengembangan kawasan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan dan penyuluhan teknis, serta dukungan penyediaan sarana produksi budidaya seperti benih unggul dan pakan guna meningkatkan produktivitas usaha budidaya perikanan secara berkelanjutan.

3.4.6 Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi ikan masyarakat dalam satu tahun yang dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan ikan sebagai sumber protein hewani dalam pola konsumsi masyarakat serta menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Capaian indikator AKI pada Tahun 2025 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh sumber protein lain, keterbatasan distribusi produk perikanan di beberapa wilayah, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan dan pemenuhan gizi.

Dari sisi internal, intensitas pelaksanaan program sosialisasi dan kampanye peningkatan konsumsi ikan masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, diversifikasi produk olahan hasil perikanan juga masih perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan minat konsumsi ikan di kalangan masyarakat.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan program edukasi dan kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN), mengembangkan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, serta meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas produk perikanan di masyarakat. Dengan demikian diharapkan tingkat konsumsi ikan masyarakat dapat meningkat secara bertahap dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

3.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam mengevaluasi sejauh mana intervensi pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian indikator kinerja, sehingga dapat diketahui program atau kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target maupun yang belum memberikan hasil optimal.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran pada Tahun 2025, terdapat beberapa program utama yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis sektor perikanan, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Selain itu, terdapat pula Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berperan dalam mendukung kelancaran operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan salah satu program utama yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian indikator Produksi Perikanan Tangkap. Melalui kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan serta kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, program ini berperan dalam meningkatkan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan serta memperkuat kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap. Tingkat realisasi anggaran pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan yang mencapai tingkat tinggi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap yang bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, tingkat realisasi anggaran relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan belum sepenuhnya optimal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi perikanan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan nelayan.

- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya berperan dalam mendukung pencapaian indikator Produksi Perikanan Budidaya serta indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Melalui kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya perikanan serta memperkuat kapasitas pembudidaya ikan di daerah. Tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi pada kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan menunjukkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan secara relatif baik sehingga mampu mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya.

Meskipun demikian, kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil tidak terealisasi pada Tahun 2025, sehingga dukungan terhadap peningkatan kapasitas pembudidaya ikan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), karena peningkatan produktivitas budidaya belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

- 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui kegiatan pengolahan hasil perikanan serta memperkuat akses pemasaran bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Tingkat realisasi anggaran yang mencapai 100 % menunjukkan bahwa kegiatan dalam program ini telah dilaksanakan secara optimal. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi produk perikanan serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Program ini mencakup berbagai kegiatan administrasi dan dukungan operasional yang memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi pada sebagian besar kegiatan penunjang menunjukkan bahwa aspek manajemen organisasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program teknis sektor perikanan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan, khususnya dalam peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Namun demikian, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan pelaku usaha perikanan belum terlaksana secara optimal sehingga berdampak pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat.

Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya diperlukan penguatan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan nilai tambah produk perikanan. Dengan demikian, diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja serta pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Nias Selatan secara berkelanjutan.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang baik diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan program pembangunan sektor perikanan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan untuk melihat tingkat serapan anggaran serta keterkaitannya dengan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	902.256.893,50	618.098.232,14	586.699.910,00	95%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.643.000,00	10.000.000,00	-	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.389.534,50	302.471.138,24	298.312.728,00	99%
<i>Pengadaan Barang</i>	<i>46.117.059,00</i>	<i>32.287.013,90</i>	<i>30.886.860,00</i>	<i>96%</i>

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<i>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.280.000,00	188.280.000,00	173.360.000,00	92%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.627.300,00	44.860.080,00	43.940.322,00	98%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.171.185.532,50	1.335.113.260,00	1.216.418.707,00	91%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	979.933.100,00	1.085.113.260,00	1.069.224.257,00	99%
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	191.252.432,50	250.000.000,00	147.194.450,00	59%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	269.052.468,00	189.324.900,00	174.644.000,00	92%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	58.747.568,00	-	-	0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	210.304.900,00	189.324.900,00	174.644.000,00	92%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	37.505.106,00	18.880.079,00	18.808.000,00	100%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	37.505.106,00	18.880.079,00	18.808.000,00	100%
	2.380.000.000,00	2.161.416.471,14	1.996.570.617,00	92%

Berdasarkan data pada Tabel 3.4, total pagu anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 setelah mengalami pergeseran anggaran adalah sebesar Rp2.161.416.471,14 dari pagu awal sebesar Rp2.380.000.000,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.996.570.617,00 atau sebesar 92 % dari total pagu setelah pergeseran. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran setelah pergeseran sebesar Rp618.098.232,14 dengan realisasi sebesar Rp586.699.910,00 atau sebesar 95 %. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan penunjang yang meliputi administrasi keuangan, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, serta pemeliharaan barang milik daerah telah dilaksanakan secara optimal. Kegiatan-kegiatan tersebut berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi dan pelaksanaan program teknis sektor perikanan.

Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal, seperti pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tidak memiliki realisasi anggaran pada Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan prioritas kegiatan, efisiensi anggaran, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi selama tahun berjalan.

Selanjutnya pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pagu anggaran setelah pergeseran sebesar Rp1.335.113.260,00 dengan realisasi sebesar Rp1.216.418.707,00 atau sebesar 91 %. Program ini merupakan salah satu program utama dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Nias Selatan. Realisasi anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi sebesar 99 %. Tingginya tingkat realisasi pada kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mendukung peningkatan aktivitas penangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Sementara itu, pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar 59 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, penyesuaian prioritas program, maupun kendala teknis dalam implementasi kegiatan di lapangan.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, pagu anggaran setelah pergeseran sebesar Rp189.324.900,00 dengan realisasi sebesar Rp174.644.000,00 atau sebesar 92 %. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta memperkuat kapasitas pembudidaya ikan di daerah. Realisasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mencapai 92 % yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengembangan budidaya perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian, kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil tidak memiliki realisasi anggaran pada tahun pelaporan yang dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan maupun keterbatasan pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

Selanjutnya pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pagu anggaran setelah pergeseran sebesar Rp18.880.079,00 dengan realisasi sebesar Rp18.808.000,00 atau sebesar 100 %. Program ini berfokus pada peningkatan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan guna memberikan nilai tambah bagi produk perikanan daerah. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran sebesar 92 % menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan secara cukup efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang. Optimalisasi perencanaan kegiatan, peningkatan koordinasi pelaksanaan program, serta penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran menjadi langkah penting yang perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator, analisis realisasi program dan kegiatan, serta analisis penggunaan anggaran pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan Rencana Strategis perangkat daerah.

Dari sisi capaian indikator kinerja, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan yang positif. Indikator Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan capaian yang sangat baik karena realisasi produksi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Nias Selatan masih cukup besar dan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan. Selain itu, indikator Produksi Perikanan Budidaya juga menunjukkan capaian yang relatif baik dan mendekati target yang direncanakan, yang menandakan bahwa kegiatan budidaya perikanan di daerah mulai berkembang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan secara keseluruhan.

Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi perikanan mengalami peningkatan, dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha perikanan masih belum sepenuhnya optimal. Selain itu, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) juga masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Selain capaian indikator kinerja, pengelolaan anggaran juga menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi anggaran Tahun 2025, tingkat penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan mencapai 92 % dari total pagu anggaran setelah pergeseran. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik serta didukung oleh pemanfaatan anggaran yang relatif efektif dan efisien. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mendukung pembangunan sektor perikanan daerah. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan program pembangunan sektor perikanan agar capaian kinerja pada masa mendatang dapat meningkat secara lebih optimal serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2 Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang mempengaruhi capaian kinerja sektor perikanan di Kabupaten Nias Selatan, diperlukan berbagai langkah pemecahan masalah yang bersifat strategis, terarah, dan berkelanjutan. Upaya pemecahan masalah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melalui penguatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan seperti alat tangkap yang ramah lingkungan, benih unggul, serta dukungan sarana budidaya yang memadai juga perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas usaha perikanan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, diperlukan penguatan sistem pemasaran hasil perikanan melalui pengembangan rantai distribusi yang lebih efisien serta peningkatan akses pasar bagi produk perikanan daerah. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga perlu terus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melalui penguatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dilakukan secara optimal tanpa mengurangi keberlanjutan ekosistem perairan. Dalam hal ini, peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan serta penerapan praktik perikanan yang ramah lingkungan menjadi langkah penting yang perlu diperkuat.

Selain itu, untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang bergizi. Program kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) perlu terus ditingkatkan serta didukung dengan pengembangan produk olahan hasil perikanan yang lebih beragam dan menarik bagi masyarakat.

4.3 Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan akan melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan program dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis pembangunan daerah. Perencanaan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian indikator kinerja.

Selain itu, Dinas Perikanan juga akan melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala. Melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat sehingga tidak menghambat pencapaian target kinerja.

Dalam rangka meningkatkan sinergi pembangunan sektor perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan juga akan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, maupun pelaku usaha perikanan. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan sektor perikanan di daerah.

Selain itu, Dinas Perikanan juga akan terus mendorong pengembangan inovasi dalam pengelolaan sektor perikanan, baik dalam bidang produksi, pengolahan hasil perikanan, maupun pemasaran produk perikanan. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan daerah.

Dengan berbagai langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sektor perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

LAMPIRAN



Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
(22865)